KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemda Ungkap Kondisi Nduga ke DPR
Tanggal : Selasa, 06 Agustus 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pemda Ungkap Kondisi Nduga ke DPR

● FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nduga, Papua, mengadakan audiensi dengan pimpinan DPR pada Senin (5/8) siang. Sekretaris Daerah (sekda) Nduga Namia Wijangge menyebut banyak pembangunan di Nduga terbengkalai karena konflik berkepanjangan antara TNI dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terjadi di Nduga.

"Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan, tapi anggota TNI-Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan, tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana, dan trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma," ungkap Namia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Menurut Namia, trauma tersebut masih terjadi hingga sekarang. Imbasnya, banyak sekolah di 11 distrik di Nduga tidak beroperasi. "Kasihan masyarakat di sana tidak ada hak dasar, pendidikan semua kosong, kemudian beberapa puskesmas, posyandu, tidak jalan, pendidikan tidak jalan, kemudian pelayanan kesehatan juga tidak jalan, kemudian gereja di sana ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," kata dia.

Namia juga mengungkapkan, sampai saat ini pemda tidak bisa turun ke daerah konflik. Pasalnya, nyawa mereka akan terancam jika para pemberontak tahu bahwa masyarakat bekerja untuk Indonesia.

"Mereka yang OPM (Organisasi Papua merdeka) di sana menganggap kami, kami yang bekerja di dalam pemerintah itu dianggap pegawai Republik Indonesia sehingga 'kamu masuk juga kami tembak', seperti itu, sehingga kami juga tidak bisa masuk ke sana," kata dia.

Bupati Nduga Yairus Gwijangge mengungkapkan, masyarakat Nduga saat ini tidak hidup tenang. Sebagian dari mereka ada yang melarikan diri ke hutan. "Sehingga kami dengan harapan penuh meminta Bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri organik dan non-organik, itu sama-sama melaksanakan tugas di sana, tidak menjadi masalah," kata dia.

Menanggapi itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo akan mengupayakan pertemuan dengan sejumlah pihak untuk membicarakan terkait keamanan masyarakat di Nudga. Selain itu, ia juga akan mendorong komisi I dan komisi III untuk mengundang Panglima TNI dan Kapolri untuk menurunkan tensi di Nduga.

"Ditambah petugas keamanan yang sudah ada di sana. Misalnya ada kodim, kores, itu yang diberdayakan lebih kuat lagi di sana karena kores dan kodim sudah mengenal masyarakat di sana sehingga untuk pengamanannya bisa dilakukan dengan jaminan, tentu saja *enggak* boleh ada lagi petugas kita atau aparat kita yang tewas akibat serangan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Baku tembak antara sayap OPM, kelompok kriminal bersenjata, terakhir terjadi pada Selasa (23/7). TNI melakukan pengejaran terhadap sekitar 20 orang KKB yang menyerang mereka. Namun, tidak ada informasi korban dalam kejadian tersebut.

Sementara, pada Selasa, (30/7), Pasiops Satgas Pamtas RI-PNG Yonif R 321 Kostrad Kapten Inf Johan Bormasa mengungkapkan, aktivitas perekonomian di Nduga sudah lancar. Masyarakat tidak lagi dihinggapi ketakutan, bahkan anak-anak, orang dewasa sudah tidak sungkan dengan anggota TNI. ■ rizky suryarandika **ed:** ilham tirta

PERPUSTAKAAN DPR-RI